

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan dengan adanya era baru dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat, maju, serta dapat berkembang atau tidak, hal itu tergantung pada bagaimana cara suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

Suatu otonomi daerah dikatakan berhasil tersebut tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya secara tertib, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, ekonomis, serta bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 Tahun 2005, Pasal 4).

Kemampuan suatu keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, sebab pemerintah daerah tersebut tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efisien dan efektif apabila tanpa adanya biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan dari keuangan inilah dapat diketahui kemampuan suatu daerah dalam mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan keuangan suatu daerah di dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah.

Kinerja Keuangan Daerah adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD (Halim, 2012: 212). Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah tersebut sangat penting digunakan untuk menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan suatu daerah. Akuntabilitas tersebut bukan hanya sekedar kemampuan yang menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, namun juga meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Efektif artinya penggunaan dana tersebut harus mencapai target-target untuk kepentingan publik. Efisien artinya menggunakan dana tersebut menghasilkan output yang maksimal. Ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dengan jumlah dan kualitas tertentu dengan tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2013: 182).

Salah satu cara yang digunakan untuk menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya yaitu dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Menurut Halim (2012), pengukuran kinerja Pemerintah dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, antara lain Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Derajat Kontribusi BUMD.

Rasio Kemandirian Daerah menggambarkan suatu ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal (Pemerintah Pusat) (Halim, 2012: 221-234). Rasio Efektivitas yaitu menggambarkan kemampuan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang telah direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil yang dimiliki daerah. Selanjutnya untuk rasio efisiensi yaitu menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah (Mardiasmo, 2013: 112).

Kemudian untuk Rasio Keserasian yaitu menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dana yang dimiliki pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal (Halim, 2012: 221-234). Rasio Pertumbuhan PAD yang bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau tidak (Mahmudi, 2010: 138).

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menggambarkan seberapa besar tingkat ketergantungan keuangan suatu daerah. Yang terakhir adalah Rasio Derajat Kontribusi BUMD yaitu menggambarkan seberapa besar tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah.

Penelitian ini mengacu hasil penelitian yang dilakukan oleh Aldy H.R. Pengkey, Ivonne S. Saerang, dan Joy E. Tulung (2017). Dalam penelitian tersebut, membahas tentang analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun anggaran 2011-2015. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan empat variabel yaitu pengukuran dengan menggunakan rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio ketergantungan daerah, rasio derajat kontribusi BUMD, serta obyek penelitiannya yang lebih luas yaitu Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun dan periode nya pun berbeda yaitu tahun 2014-2018.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul: Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Karesidenan Madiun 2014-2018.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun berdasarkan analisis rasio kemandirian daerah tahun 2014-2018?

2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun berdasarkan analisis rasio efektivitas tahun 2014-2018?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun berdasarkan analisis rasio efisiensi keuangan daerah tahun 2014-2018?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun berdasarkan analisis rasio keserasian tahun 2014-2018?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun berdasarkan analisis rasio pertumbuhan PAD tahun 2014-2018?
6. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun berdasarkan analisis rasio ketergantungan keuangan daerah tahun 2014-2018?
7. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun berdasarkan analisis rasio derajat kontribusi BUMD tahun 2014-2018?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di ungkap sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun berdasarkan analisis rasio kemandirian daerah tahun 2014-2018.
2. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun berdasarkan analisis rasio efektivitas tahun 2014-2018.
3. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun berdasarkan analisis rasio efisiensi keuangan daerah tahun 2014-2018.
4. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun berdasarkan analisis rasio keserasian tahun 2014-2018.
5. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun berdasarkan analisis rasio pertumbuhan PAD tahun 2014-2018.
6. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun berdasarkan analisis rasio ketergantungan keuangan daerah tahun 2014-2018.
7. Menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun berdasarkan analisis rasio derajat kontribusi BUMD tahun 2014-2018.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta dapat meningkatkan kemampuan analisis tentang rasio keuangan dan analisis mengenai kinerja keuangan selama periode yang bersangkutan.

##### 2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran dan informasi sebagai bahan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dengan baik.

##### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi dan dapat memberikan gambaran untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai analisis rasio terhadap kinerja pemerintah, serta dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca

#### **E. Sistematika Penelitian**

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi yaitu menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian

### BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi antara lain desain penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

### BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti beserta penjelasan mengenai gambaran umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun. Serta membahas mengenai analisis data dan pembahasannya.

### BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi antara lain tentang simpulan dari pembahasan, keterbatasan penelitian dan saran terkait hasil penelitian.